

Received : 10 January 2024

Revised : 26 November 2024

Accepted : 29 November 2024

**Determinasi Kinerja Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pasar Perbatasan
Kabupaten Timor Tengah Utara-Timor Leste**

Margareta Diana Pangastuti ¹⁾, Frederic Winston Nalle^{2*)}

fredericnalle@student.ub.ac.id

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, Kefamenanu;

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh literasi keuangan, inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan norma subjektif terhadap kinerja UMKM di kawasan pasar perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara–Timor Leste dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui analisis regresi linear berganda, diperkaya dengan pendekatan kualitatif untuk menangkap konteks lapangan. Data dikumpulkan dari 80 pelaku UMKM di tiga pasar lintas batas: Wini, Haumeni Ana, dan Napan. Hasil menunjukkan bahwa inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, sementara literasi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Model regresi menjelaskan 81,68% variasi kinerja UMKM. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup geografis yang sempit, sehingga hasil perlu digeneralisasi dengan hati-hati. Meski demikian, studi ini memberikan kontribusi penting bagi strategi pemberdayaan UMKM perbatasan, khususnya dalam hal penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, peran pemerintah daerah, serta pemanfaatan norma sosial sebagai modal budaya. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi dimensi sosial, teknologi, dan kelembagaan dalam kerangka empiris yang relevan dengan karakteristik wilayah tertinggal dan strategis.

Kata Kunci: Dukungan Pemerintah, Inovasi Teknologi, Literasi Keuangan, , Norma Subjektif, Kinerja UMKM.

Abstract

This study examines the influence of financial literacy, technological innovation, government support, and subjective norms on the performance of MSMEs in the border market area of Timor Tengah Utara Regency–Timor Leste, within the context of post-COVID-19 economic recovery. A quantitative approach was applied using multiple linear regression analysis, complemented by qualitative methods to capture contextual depth. Data were collected from 80 MSME actors across three major cross-border markets: Wini, Haumeni Ana, and Napan. The findings reveal that technological innovation, government support, and subjective norms have a positive



and significant impact on MSME performance, while financial literacy shows a negative and insignificant effect. The regression model explains 81.68% of the variation in MSME performance. The study is limited by its narrow geographical scope, which requires caution in generalizing the findings. Nonetheless, it offers valuable insights for developing MSME empowerment strategies in border areas, particularly through financial literacy strengthening, digital transformation, enhanced institutional support, and leveraging social norms as cultural capital. The novelty of this research lies in its integration of social, technological, and institutional dimensions within an empirical framework relevant to underdeveloped yet strategic regions.

Keywords: *Government Support, Technological Innovation, Financial Literacy, Subjective Norms, SME Performance.*

Pendahuluan

Peranan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian penting dalam menopang perekonomian nasional. Pengalaman sejarah mencatat bahwa ketika Indonesia mengalami krisis moneter dan ekonomi di tahun 1998 maka yang menjadi fondasi serta garda terdepan perekonomian negara saat itu adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketika hampir seluruh perusahaan besar padat modal yang bergerak di bidang ekspor dan impor mengalami kebangkrutan justru sektor UMKM mampu bertahan dan perannya dipandang sebagai pilar utama perekonomian nasional. Demikian pula ketika di tahun 2007-2008 saat dimana setiap negara mengalami krisis keuangan global (*global financial crisis*) tidak terkecuali Indonesia, maka yang menjadi penyelamat ekonomi nasional dalam menyerap jumlah tenaga kerja, menekan angka kemiskinan serta menjaga daya beli masyarakat adalah sektor bisnis UMKM (Pratiwi, 2020).

Data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2023) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pelaku UMKM terbesar di kawasan ASEAN, yakni mencapai 66 juta unit. UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 61 persent terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jumlah ini jauh melampaui Thailand yang berada di posisi kedua dengan 3,1 juta unit, serta Malaysia dengan 1,2 juta unit. Besarnya jumlah pelaku UMKM ini turut memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap berbagai indikator makroekonomi, seperti serapan tenaga kerja sebesar 97 persent, kontribusi terhadap ekspor nasional sebesar 14,4 persent, serta andil dalam pembentukan PDB sebesar 60,3 persen. Namun demikian, tingginya kuantitas UMKM di Indonesia belum sepenuhnya sebanding dengan kinerjanya secara agregat. Sebagai perbandingan, Myanmar yang hanya memiliki 72.700 unit UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 69,3% terhadap PDB nasionalnya. Sementara itu, kontribusi ekspor produk UMKM Indonesia yang sebesar 14,4% masih tertinggal dibandingkan Singapura (38,3%), Thailand (28,7%), Myanmar (23,7%), dan Vietnam (18,7%) (Ahdiat, 2021).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir adalah dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Dalam kajian medis, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dan menimbulkan gejala seperti demam, flu, batuk kering, kesulitan bernapas, bahkan kematian (Amri, 2020).

Virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 hingga Desember 2022, jumlah penderita Covid-19 di Indonesia mencapai 6.715.586 orang, dengan 160.524 kasus kematian. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 2,39

persen, angka yang cukup tinggi sehingga negara kehilangan banyak jiwa yang berharga.

Meskipun penyebaran virus tidak lagi secepat awal kemunculannya pada tahun 2020, pemerintah terus berupaya memutus rantai penularan. Berbagai kebijakan diterapkan, seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home (WFH)*, penerapan protokol kesehatan, vaksinasi bertahap hingga dosis ketiga, serta alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial (Rosita, 2020). Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi Covid-19. Namun, situasi ini juga membawa dilema. Di satu sisi, pemerintah berusaha menyelamatkan nyawa, tetapi di sisi lain, perekonomian nasional terpuruk, dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang melakukan efisiensi.

Data nasional menunjukkan bahwa saat Indonesia memasuki masa hidup berdampingan dengan COVID-19, perekonomian nasional mengalami guncangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang semula mencapai 5,02 persen pada tahun 2019, menurun drastis menjadi 2,97 persen di akhir tahun 2020. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh merosotnya kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dikenal sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Faizi et al. (2022) mencatat bahwa berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat sekitar 64.194.057 unit UMKM yang menyerap 116.978.631 tenaga kerja. Namun, selama masa pandemi, sebanyak 163.713 unit usaha terpaksa berhenti beroperasi akibat tekanan ekonomi, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan angka pengangguran. Dari total 29 juta angkatan kerja, tercatat 7,07 persen atau sekitar 9,77 juta orang kehilangan pekerjaan (Rusman, 2021).

Dampak stagnasi ekonomi akibat pandemi juga dirasakan secara nyata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Pusat Statistik Provinsi NTT (2021) melaporkan bahwa pada triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,96 persen. Kontraksi ini mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, yang dipengaruhi oleh menurunnya kinerja berbagai lapangan usaha utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari 17 kategori lapangan usaha, hanya tiga yang menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu sektor informasi dan komunikasi (15,36%), jasa keuangan (12,32%), dan pengadaan listrik dan gas (11,76%). Sebaliknya, sektor-sektor yang erat kaitannya dengan aktivitas UMKM justru mengalami kontraksi yang cukup tajam, seperti jasa perusahaan (-53,5%), akomodasi, makanan dan minuman (-42,36%), serta transportasi (-23,22%). Bahkan sektor unggulan NTT seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan turut mengalami stagnasi, sehingga membatasi kontribusinya terhadap peningkatan PDRB daerah (Elim, Sangaji and Nggili, 2021). Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran terbuka. Tercatat, tingkat pengangguran meningkat dari 1,14 persen pada Agustus 2019 menjadi 4,28 persen pada Agustus 2020, atau naik sebesar 3,14 persen dalam satu tahun, setara dengan sekitar 120 ribu orang yang kehilangan pekerjaan.

Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menyadari pentingnya kebijakan strategis lintas sektor yang terarah dan efektif untuk menghidupkan

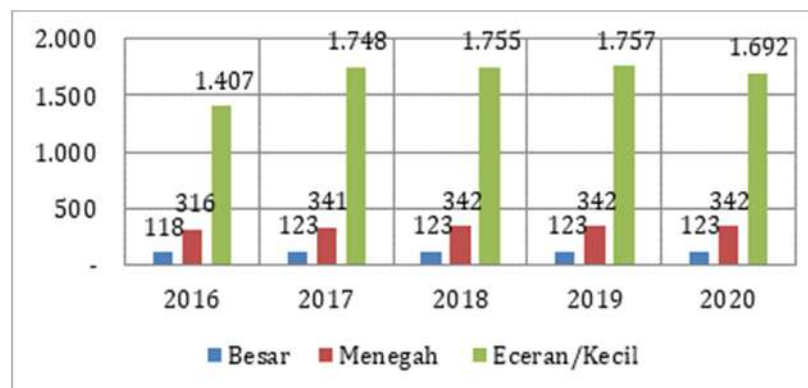
kembali sektor riil, termasuk pelaku UMKM. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT mencatat bahwa sebanyak 4.157 UMKM mengalami kerugian dengan penurunan pendapatan hingga 75 persen selama masa pandemi. Perhatian terhadap sektor UMKM tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kupang, yang mencatat bahwa sektor ini berkontribusi sekitar 99 persen terhadap PDRB Provinsi NTT dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1,5 juta orang (Atmaja, 2020).

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT yang letaknya berbatasan langsung dengan Negara Democratic Timor Leste (RDTL). Secara geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tentunya memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktifitas perdagangan. Jalur perdagangan lintas batas merupakan salah satu aktifitas perekonomian dalam menyumbang pendapatan masyarakat dan juga daerah. Minat masyarakat di wilayah perbatasan dalam melakukan kegiatan investasi dan aktifitas perdagangan melalui hadirnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergolong memiliki prospek yang cukup baik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 2.222 pelaku usaha berskala kecil dan menengah telah memiliki izin usaha dan terus beroperasi hingga saat ini (BPS Kabupaten TTU, 2021).

Dalam rangka mendorong dinamika perdagangan barang dan jasa, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah membangun 32 pasar rakyat yang tersebar di 24 kecamatan, baik di pusat kecamatan maupun desa-desa strategis yang menjadi titik temu antara produsen dan konsumen. Di antara pasar-pasar tersebut, terdapat tiga pasar yang terletak di kawasan perbatasan langsung dengan Distrik Ambeno, Oecusse – Timor Leste, yakni Pasar Wini di Kecamatan Insana Utara, Pasar Napan di Kecamatan Bikomi Utara, dan Pasar Haumeni Ana di Kecamatan Bikomi Nilulat. Ketiga pasar ini memiliki peran penting sebagai penghubung ekonomi lintas batas, yang tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal di wilayah perbatasan Kabupaten TTU, tetapi juga warga Timor Leste yang masih sangat bergantung pada pasokan barang kebutuhan pokok dari Indonesia (Oki and Babulu, 2021). Lebih dari sekadar ruang transaksi barang dan jasa, pasar-pasar perbatasan ini juga menjadi ruang sosial penting, terutama sebagai wadah silaturahmi bagi keluarga dan kerabat yang terpisah akibat dinamika politik pasca-referendum Timor Leste tahun 1999. Kegiatan perdagangan di pasar-pasar ini tidak berlangsung setiap hari, melainkan hanya pada hari-hari tertentu dalam sepekan. Pasar Wini beroperasi setiap hari Senin, Pasar Napan pada hari Jumat, dan Pasar Haumeni Ana aktif setiap hari Sabtu (Oki, 2021).

Tingginya aktivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste menciptakan arus perputaran barang, jasa, dan uang yang relatif intens. Dalam praktiknya, transaksi perdagangan di kawasan ini tidak hanya menggunakan mata uang Rupiah (IDR), tetapi juga Dolar Amerika Serikat (USD), yang merupakan mata uang resmi Timor Leste. Fenomena ini menjadikan penggunaan mata uang asing sebagai sesuatu yang lumrah bahkan di kalangan masyarakat pedesaan yang secara umum masih bersifat tradisional. Konteks ini turut membuka peluang bagi kelompok masyarakat pemilik modal untuk berperan sebagai agen penukaran valuta asing (money changer), seringkali dengan motif spekulatif untuk memperoleh keuntungan dari selisih kurs.

Situasi tersebut sempat memberikan berkah ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan, melalui peningkatan peluang usaha, perluasan lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan rumah tangga. Namun kondisi ini berubah drastis ketika pandemi COVID-19 mulai melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Maret 2020. Lonjakan kasus infeksi memaksa pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna membatasi mobilitas dan interaksi sosial masyarakat. Meskipun kebijakan ini bersifat darurat dan ditujukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, dampaknya terhadap sektor ekonomi sangat signifikan. Aktivitas perdagangan terhenti, interaksi lintas batas dibatasi, dan sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten TTU mengalami stagnasi bahkan harus menutup usahanya akibat tekanan ekonomi yang berat.



Gambar 1. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Skala Usaha di Kabupaten TTU
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU (2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), baik skala kecil, menengah, maupun besar, cukup bervariasi. Namun, dominasi terbesar terdapat pada usaha berskala kecil, yang tercatat sebanyak 1.407 unit pada tahun 2016, meningkat menjadi 1.757 unit pada 2019, sebelum akhirnya menurun menjadi 1.692 unit pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah usaha skala menengah dan besar relatif stagnan tanpa peningkatan signifikan sepanjang periode pengamatan. Data ini memperkuat fakta bahwa sejak awal penyebaran COVID-19 di tahun 2020, jumlah UMKM di Kabupaten TTU mengalami stagnasi, bahkan sebanyak 65 unit usaha tercatat tutup secara permanen. Redjo, (2022) mengungkapkan bahwa selama masa pandemi, sekitar 90% pelaku UMKM di wilayah ini kehilangan hingga 80% dari omset penjualan mereka.

Sebagai respons terhadap membaiknya kondisi pandemi, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemiologis dan penurunan signifikan angka penyebaran COVID-19. Dampaknya, masyarakat kembali dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih leluasa. Inilah fase krusial pemulihan ekonomi nasional, di mana pemerintah bersama

pemangku kepentingan berupaya mengembalikan stabilitas dan pertumbuhan melalui program pemulihan (recovery). Sektor UMKM pun mulai bangkit dan menata kembali operasionalnya setelah dua tahun mengalami tekanan berat.

Hingga saat ini, kajian mengenai jalur perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan menempatkan pelaku UMKM sebagai fokus utama penelitian masih sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Oki dan Burhanuddin, (2020) misalnya, lebih menekankan pada pengaruh perdagangan lintas batas melalui pendekatan modal sosial dan perubahan kelembagaan dengan mediasi variabel aksesibilitas. Sementara itu, studi oleh Patiung dan Taus, (2022) hanya membahas pengaruh aktivitas perdagangan lintas batas terhadap tingkat ekonomi masyarakat lokal secara umum. Di sisi lain, penelitian oleh Zakarias Dos Santos Maia, Marianus Kleden, (2020) berfokus pada aspek ekonomi politik, khususnya terkait pembatasan *border pass* yang justru mendorong munculnya jalur perdagangan ilegal serta keterlibatan aparat militer dalam praktik pungutan liar.

Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk menggali dan menemukan berbagai permasalahan pengembangan sektor UMKM di wilayah perbatasan NKRI-Negara Timor Leste dengan menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan *input* bagi pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan publik dalam meningkatkan kinerja UMKM yang peran dan fungsi sektor ini bisa memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Determinan Kinerja Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pasar Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Timor Leste.*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM di kawasan perbatasan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan menyoroti aspek literasi keuangan, inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan norma subjektif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam merumuskan strategi yang relevan untuk mendukung keberlanjutan UMKM di wilayah perbatasan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di kawasan strategis tersebut.

Tinjauan Pustaka

Secara umum sulitnya pelaku UMKM untuk dapat berkembang tidak terlepas dari permasalahan konvensional yang selama ini belum dapat terpecahkan secara tuntas. Beberapa permasalahan yang sering dijumpai seperti terbatasnya akses pembiayaan, minimnya pemahaman tentang literasi keuangan, rendahnya daya saing, terbatasnya kapasitas SDM, sulitnya akses pemasaran, keterbatasan akses teknologi informasi, minimnya dukungan pemerintah daerah, rendahnya motivasi dan berbagai variabel penting lainnya dalam menentukan eksistensi keberhasilan dan pengembangan usaha (Rahayu, 2017). Menyadari akan hal ini maka dalam upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UMKM diperlukan kolaborasi lintas sektoral serta langkah strategis yang tepat sasaran dan berdayaguna.

Literasi Keuangan

Salah satu variable penting yang sangat menentukan kinerja atau keberhasilan menjalankan bisnis UMKM adalah Literasi Keuangan. Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam merencanakan serta mengelola keuangan secara efektif saat menjalankan usaha atau bisnisnya. Pelaku usaha dituntut agar dapat memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengakses lembaga keuangan bank maupun non bank guna membiayai kegiatan usahanya serta bagaimana mengelola keuangannya secara profesional dan bertanggungjawab (Yanti, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Aribawa, (2016) mengungkapkan bahwa literasi keuangan merupakan variable yang sangat fundamental dalam menentukan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pelaku usaha diberikan Literasi keuangan yang komprehensif maka secara substansial ada 3 sudut pandang utama yang melekat langsung pada setiap aktor dalam mendukung keberhasilan pembangunan. *Pertama*; sudut pandang konsumen, dengan dibekalinya literasi keuangan yang baik maka dalam menentukan keputusan pembelian konsumen akan menjadikan faktor kualitas produk barang dan jasa sebagai aspek yang paling utama. Hal ini secara tidak langsung dari sisi produsen akan menciptakan kompetisi yang sehat, inovasi dan daya saing dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. *Kedua*; dari sudut pandang Penyedia Jasa Keuangan, dengan dukungan literasi keuangan yang baik maka pelanggan akan memahami produk, kemungkinan resiko yang dihadapi, efisiensi biaya, hingga pengalaman manajerial dalam mencapai profit. *Ketiga*; dari sudut pandang Pemerintah; Literasi keuangan yang baik akan menopang nilai pajak yang diterima sehingga sisi penerimaan fiskal dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Inovasi Teknologi

Dalam jangka panjang pelaku UMKM yang tidak mampu adaptif dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dengan melakukan transformasi digital bisa dipastikan akan mengalami kegagalan industry (Eryc, 2022). Dalam era industry 4.0 seperti saat ini dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas usaha maka diperlukan literasi digital (Ilarrahmah and Susanti, 2021). Menyadari akan hal ini maka variable lainnya yang turut menentukan kinerja UMKM adalah Inovasi Teknologi. Inovasi itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana setiap pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif dalam menemukan gagasan atau ide-ide baru yang unik namun efektif dalam menghadapi persaingan dunia bisnis yang semakin kompetitif (Fatimah and Azlina, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Basry and Sari, (2018) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Konfederasi Industri di India memperlihatkan bahwa dengan penggunaan Teknologi Informasi menyebabkan pelaku UMKM di negara tersebut mengalami peningkatan segmen pasar dan pendapatan sebesar 75 persent.

Dukungan Pemerintah

Menyadari betapa besarnya pengaruh UMKM bagi perekonomian nasional maka sudah menjadi keharusan sektor ini mendapat perhatian serius pemerintah pada setiap level wilayah administrative agar senantiasa iklim investasi dan bisnis tetap terjaga. Pemerintah hadir dan berperan sebagai katalisator, fasilitator,

dinamisator, regulator dan juga advokasi dalam upaya menghadirkan iklim investasi yang kondusif (Sulastri and Dilastri, 2015). Kehadiran UMKM perlu diakomodasi kebutuhannya bukan saja hanya mengenai sarana prasarana pendukung akan tetapi juga mengenai regulasi yang berpihak bagi pengembangnya, insentif dan proteksi, serta pelayanan birokrasi yang ramah dengan pertumbuhan dunia usaha (Desiyanti, 2014).

Norma Subjektif

Berikutnya variabel yang dinilai cukup penting dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM adalah Norma subjektif. Seseorang akan memiliki sikap tentang apa yang diyakininya sangat tergantung dari cara pandang orang lain dalam menilai kegiatan usahanya (Amalia and Nurussama, 2018). Norma subjektif ini terdiri dari norma sosial dan norma deskriptif. Dimana norma sosial menyangkut keyakinan dalam berusaha atas dukungan, pandangan/pendapat bahkan tuntutan dari orang lain. Sedangkan norma deskriptif merupakan tindakan aktual dari orang-orang terdekat atau terpercaya dalam memengaruhi keputusan berusaha (Suci, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Supriono, (2015) dan Suci, (2016) menunjukkan bahwa Norma Subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan kinerja UMKM.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif atau analisis inferensial untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan *independent variable* (Literasi Keuangan, Inovasi Teknologi, Dukungan Pemerintah dan Norma Subjektif) Terhadap Variabel Kinerja UMKM sebagai *dependent variable*. Disamping itu juga guna menggali lebih jauh hasil temuan kuantitatif maka terasa perlu dipadukan dengan metode kualitatif dalam upaya untuk melihat lebih jauh berbagai indikator yang menyebabkan ada atau tidaknya pengaruh dari setiap *independent variable* terhadap *dependent variabel*. Hal ini dimaksudkan agar pada gilirannya penulis mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat Pelaku UMKM di wilayah perbatasan.

Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama delapan bulan terhitung dari bulan Maret hingga Oktober tahun 2022 dengan berfokus pada pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di Pasar Perbatasan NKRI-Timor Leste. Oleh karena itu yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang menyebar pada tiga titik wilayah pasar perbatasan yaitu pasar Wini Kecamatan Insana Utara, Pasar Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulalat dan Pasar Napan Kecamatan Bikomi Utara. Total populasi dari ketiga pasar ini ada sebanyak 693 pelaku UMKM dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan *simple random sampling* berdasarkan rumus Slovin, sehingga yang menjadi perwakilan pelaku UMKM dari ketiga pasar perbatasan tersebut dan merupakan sampel penelitian adalah sebesar 80 orang responden. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah Pelaku UMKM yang bergerak pada usaha perdagangan industri kreatif, memiliki kepemilikan modal

dalam rentangan Rp. 50 juta – Rp.500 juta, memiliki kepemilikan izin usaha yang masih aktif dan konsisten sebagai pelaku UMKM di Pasar Perbatasan selama 10 tahun terakhir. Besarnya populasi dan sampel dapat dilihat dalam table 1 berikut ini.

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sample Penelitian

No	Lokasi	Populasi	Sample
1	Pasar Perbatasan Wini Kecamatan Insana Utara	342	34
2	Pasar Perbatasan Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat	215	26
3	Pasar Perbatasan Napan Kecamatan Bikomi Utara	136	20
Total		693	80

Sumber: Dinas Deperidagkop Kab. TTU Tahun 2024.

Tampilan Lokasi Pasar Perbatasan yang merupakan tempat kegiatan pelaku UMKM yang menyebar di ketiga Kecamatan wilayah perbatasan NKRI-Timor Leste sehingga dijadikan sebagai populasi dan sampel penelitian dapat dilihat dalam gambar Peta berikut ini.



Gambar 2. Peta Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Lokasi Penelitian

Sumber: Hasil Desain Peta Dengan Aplikasi ArcGis Tahun 2022.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pelaku UMKM yang memang menjadi responden atau sample penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga pemerintah berupa dokumen publikasi data yang berhubungan erat dengan penelitian seperti data jumlah pelaku UMKM yang diperoleh dari Dinas Deperidagkop Kabupaten TTU, serta data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.

Instrument pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner, wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Setiap indikator yang melekat dalam variable penelitian (Literasi Keuangan, Teknologi Informasi, Dukungan Pemerintah, Norma Subjektif dan Kinerja UMKM) disusun dalam bentuk pernyataan positif agar dapat memudahkan responden

dalam menjawab. Setiap indikator yang ada dalam variable penelitian dijadikan sebagai item pernyataan merupakan hasil kajian penelusuran teori serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Alternatif jawaban yang ada dalam kuisioner penelitian yang disodorkan kepada responden merupakan jawaban terpimpin berdasarkan skala likert tingkat 4 dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju.

Setelah seluruh responden melakukan pengisian data maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan kuisioner serta tabulasi data. Tujuan dilakukannya tabulasi untuk dijadikan sebagai bahan analisis data. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran karakteristik responden serta menguraikan kondisi faktual dari penelusuran informasi yang mendalam terkait variable yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan dari variable literasi keuangan, teknologi informasi, dukungan pemerintah dan norma subjektif terhadap kinerja UMKM. Formulasi dari analisis regresi lienar berganda ini menurut Ghozali (Dalam Nalle *et al.*, 2022).

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

- Y = Kinerja Pelaku UMKM di Pasar Perbatasan
- a = Konstanta
- $\beta_1 X_1$ = Koefisien Regresi Variabel Literasi Keuangan
- $\beta_2 X_2$ = Koefisien Regresi Variabel Teknologi Informasi
- $\beta_3 X_3$ = Koefisien Regresi Variabel Dukungan Pemerintah
- $\beta_4 X_4$ = Koefisien Regresi Variabel Norma Subjektif
- ε = Epsilon

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Software Eviews 12* namun agar memenuhi kaidah statistik maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menguji kualitas instrument pengumpulan data berupa pengujian validitas dan realibilitas data. Hal ini sebagai syarat mutlak agar data yang dianalisis turut menghasilkan *output* penelitian yang akurat. Selanjutnya juga dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama usaha. Data ini bertujuan memberikan gambaran demografis dan profil usaha pelaku UMKM di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis kelamin mencerminkan distribusi peran gender, usia menunjukkan tingkat produktivitas dan pengalaman, pendidikan merepresentasikan kapasitas intelektual dan potensi inovasi, sementara lama usaha mencerminkan stabilitas dan ketahanan menghadapi dinamika pasar, termasuk

pandemi. Analisis ini menjadi dasar penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja UMKM secara menyeluruh.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Prosentase (%)
Jenis Kelamin:		
▪ Laki-laki	27	33,75
▪ Perempuan	53	66,25
Umur Responden:		
▪ 25-35 Tahun	12	15,00
▪ 36-45 Tahun	45	56,25
▪ > 45 Tahun	23	28,75
Tingkat Pendidikan		
▪ SD	33	41,25
▪ SMP	26	32,50
▪ SMA	14	17,50
▪ Diploma	5	6,25
▪ Sarjana	2	2,50
Lama Usaha:		
▪ 1-5 Tahun	27	33,75
▪ 6-10 Tahun	16	20,00
▪ ≥ 11 Tahun	37	46,25

Sumber: Olahan Data Primer Tahun 2024

Di dalam table 2 menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang melakukan aktifitas perdagangan di pasar perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste lebih didominasi oleh kaum perempuan sebesar 66,25 persen dari total 80 orang responden. Selanjutnya berdasarkan tingkat usia, mereka yang tergolong usia muda produktif dalam rentangan usia 36-45 tahun dengan prosentase sebesar 56,25 persen. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan paling banyak mereka yang berpendidikan sebatas Sekolah Dasar (SD) dengan prosentase sebesar 41,25 persen. Kemudian dari hasil pemetaan pelaku UMKM berdasarkan lama usaha maka rata-rata didominasi oleh mereka yang sudah melakukan kegiatan usaha perdagangan di atas 10 tahun dengan prosentase sebesar 46,25 persen.

Uji Validitas dan Realibilitas Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer dimana para pelaku UMKM di pasar perbatasan dijadikan sebagai responden dalam menjawab pertanyaan dalam kuisioner berdasarkan skala likert tingkat 4 (sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju) pada setiap indikator yang melekat dalam variable penelitian maka mutlak untuk dilakukan uji instrument. Pengujian instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara uji validitas dan realibilitas data sebagai syarat dan ketentuan dalam uji *statistic multivariate*. Nilai yang dijadikan sebagai patokan dalam melihat valid tidaknya data yang akan dianalisis adalah melalui pengujian *correlation pearson* dengan syarat nilai $r_{hitung} > r_{table}$ dengan standar koefisien *alpha* sebesar 0,05. Sedangkan untuk uji realibilitas data

dilakukan guna mengetahui tingkat kepercayaan jawaban responden dengan kriteria nilai *crombach alpha* > 0,60, Sugiyono (dalam Nalle and Afoan, 2022).

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Data

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Crombach Alpha	Keterangan
Literasi Keuangan (X ₁)	X1.1	0.569	0.195	0.787	Valid dan Reliabel
	X1.2	0.632	0.195		Valid
	X1.3	0.781	0.195		Valid
	X1.4	0.425	0.195		Valid
Inovasi Teknologi (X ₂)	X2.1	0.630	0.195	0.732	Valid dan Reliabel
	X2.2	0.438	0.195		Valid
	X2.3	0.503	0.195		Valid
	X2.4	0.526	0.195		Valid
Dukungan Pemerintah (X ₃)	X3.1	0.559	0.195	0.715	Valid dan Reliabel
	X3.2	0.660	0.195		Valid
	X3.3	0.356	0.195		Valid
	X3.4	0.459	0.195		Valid
Norma Subjektif (X ₄)	X4.1	0.682	0.195	0.780	Valid dan Reliabel
	X4.2	0.498	0.195		Valid
	X4.3	0.533	0.195		Valid
	X4.4	0.635	0.195		Valid
Kinerja UMKM (Y)	Y1	0.662	0.195	0.735	Valid dan Reliabel
	Y2	0.600	0.195		Valid
	Y3	0.425	0.195		Valid
	Y4	0.556	0.195		Valid

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang ditampilkan dalam table 3 menjelaskan bahwa seluruh indikator yang melekat dalam setiap variable konstruk telah memenuhi unsur validitas dan realibilitas data dikarenakan nilai *correlation person* yang diproksi melalui nilai *r* hitung > *r* table serta nilai *crombach alpha* yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 pada tingkat alpha sebesar 0,05. Kondisi ini memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahapan analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linear berganda diperlukan pengujian asumsi klasik agar nilai parameter yang dihasilkan dalam model regresi tidak bias dan memiliki tingkat ketepatan dalam melakukan estimasi. Hal ini diutarakan oleh Ghozali (dalam Nalle, Pangastuti, *et al.*, 2022). Ada beberapa uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal, uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu dan ruang sebelumnya dengan cara melihat pengujian nilai *probality chy square*, Uji Multikolinearitas yang bertujuan agar terhindar dari terjadinya korelasi sempurna di antara variable bebas serta Uji Heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Priyatno (dalam Nalle and Pangastuti, 2022).

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Asumsi Klasik			Nilai VIF
	Jargue-Bera test (P-value)	Prob. Chi Square (2) (P-value)	Prob. Chi-Square (14) (P-value)	
Residual	3,895002	0.0701	0.1832	
Literasi Keuangan				3.851
Inovasi Teknologi				4.976
Dukungan Pemerintah				5.283
Norma Subjektif				5.295

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh table 4 menjelaskan bahwa seluruh unsur dalam uji asumsi klasik telah terpenuhi dan layak untuk dilanjutkan pada tahapan analisis data. Dalam pengujian normalitas data telah menunjukkan kalau data terdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Jargue-Bera test* lebih besar dari α ($3,895002 > 0,05$). Selanjutnya untuk pengujian asumsi autokorelasi dan juga heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai *Prob. Chi-Square* yang dihasilkan lebih besar dari α ($0,0701$ dan $0,1832 > 0,05$), hal ini berarti tidak terjadi kesamaan varian pada semua variable penelitian. Dalam pengujian multikolinearitas juga menunjukkan bahwa Nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 yang berarti diantara setiap variable bebas dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang sempurna.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni mengidentifikasi pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel literasi keuangan, inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan norma subjektif terhadap kinerja UMKM di pasar perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada hasil observasi lapangan serta telaah teoritis yang relevan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah perbatasan. Sebagian besar pelaku usaha di kawasan ini masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan manajemen usaha, yang pada dasarnya mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesenjangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sehingga tetap menjalankan usaha secara konvensional tanpa dukungan signifikan dari pemerintah. Kondisi ini tidak jarang memunculkan rasa pesimis dan hilangnya kepercayaan diri terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.285203	0.958476	-1.340882	0.1840
LIT_KEU	-0.019412	0.081599	-0.237901	0.8126
INOV_TEK	0.250428	0.086700	2.888453	0.0051
DUK_PEM	0.282313	0.105275	2.681686	0.0090
NORM_SUBJ	0.586869	0.068758	8.535307	0.0000

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
R-squared	0.826053			
Adjusted R-squared	0.816775			
F-statistic	89.04119			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Dari hasil analisis data sebagaimana yang ditunjukkan dalam table 5 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_{\text{Kinj_UMKM}} = -1.285203 - 0.019412 \text{ Lit_Keu} + 0.250428 \text{ Inov_Tek} + 0.282313 \text{ Duk_Pem} + 0.586869 \text{ Norm_Subj} + \varepsilon$$

(0.8126) (0.0051) (0.0090) (0.0000)

Dalam persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -1,285203 hal ini berarti bahwa jika tidak ada perubahan secara simultan pada variable literasi keuangan, inovasi teknologi, dukungan pemerintah dan norma subjektif maka kinerja UMKM di Pasar Perbatasan Kabupaten TTU justru turun sebesar 1,285203. Sedangkan setiap variable independent secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM dengan variasi nilai koefisien regresi yang berbeda di setiap variabelnya.

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Variabel literasi keuangan secara parsial memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja UMKM dikarenakan nilai koefisien regresi yang dihasilkan sebesar -0,0194 dan juga nilai probabilitas yang lebih besar dari α (0.8126 > 0,05). Makna nilai koefisien regresi sebesar -0,0194 memberikan pengertian bahwa setiap kenaikan kinerja UMKM sebesar satu persen justru akan menurunkan tingkat literasi keuangan sebesar 0,0194 persen. Pengertian literasi keuangan dalam penelitian adalah mengenai kemampuan dalam *manage* pengelolaan keuangan secara tepat dalam meningkatkan usaha yang dijalankan. Kemampuan serta keahlian disini termasuk didalamnya mengenai akses lembaga keuangan dalam mendukung usaha yang dijalankan. Harus diakui bahwa pelaku UMKM di pasar perbatasan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Hal ini bisa terlihat dalam analisis deskriptif sebagaimana yang ada dalam table 2 sebelumnya. Rendahnya tingkat pendidikan turut memengaruhi kemampuan atau keahlian pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya. Kondisi ini justru memunculkan peluang bagi para pemilik modal yang perannya sebagai renteiner pemburu riba dalam menawarkan pinjaman dengan syarat yang sangat mudah, yaitu cukup bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sekalipun dengan bunga yang sangat tinggi, jauh dari bunga pinjaman yang dikenakan oleh lembaga perbankan, pelaku UMKM tetap memilih renteiner sebagai pilihan yang dianggap rasional. Bank masih dipandang sebagai lembaga keuangan yang eksklusif, yang bila ingin mendapatkan jasa pelayanan perbankan harus berpakaian rapi, bersih dan menarik dengan standar pelayanan yang sangat prosedural formil, memiliki jaminan/agunan yang sepadan dengan nilai pinjaman dan berbagai pandangan lainnya hingga timbul *image* kalau Bank hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

Selain permasalahan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan yang kredibel, permasalahan lain yang termasuk bagian dari variable literasi keuangan disini adalah juga termasuk ketrampilan dalam mengelola keuangan. Mulai dari dasar pengelolaan keuangan pribadi (*basic personal finance*), pengelolaan pinjaman atau kredit, tabungan dan investasi pengembangan usaha, serta manajemen resiko dalam menghadapi ancaman kerugian baik karna faktor internal maupun eksternal. Pelaku UMKM sering kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit dalam memilah sumber pemasukan yang berasal dari keuntungan menjalankan usaha dan pendapatan yang bersumber di luar usaha mereka. Minimnya peran kelembagaan baik dari pemerintah, sektor perbankan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok Perguruan Tinggi serta lembaga desa dalam memberikan edukasi ataupun berbagai bentuk pelatihan disinyalir merupakan bagian dari penyebab lemahnya pemahaman literasi keuangan pelaku UMKM di pasar perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste.

Penelitian ini berbeda dengan yang ditemukan oleh Aribawa, (2016), Sabilla and Wijayangka, (2019), Septiani and Wuryani, (2020), Pusporini, (2020), yang mengungkapkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaku UMKM. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela and Bahtiar, (2022) menjelaskan pula bahwa seseorang dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan berpengaruh dalam berperilaku untuk menabung. Menyisihkan bagian pendapatannya untuk dapat meningkatkan nilai hidup di masa depan.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman literasi keuangan, diharapkan pemerintah daerah perlu membangun pola kemitraan dengan lembaga Perguruan Tinggi sebagai lembaga penghasil produk kualitas Sumber Daya Manusia yang handal di kawasan perbatasan. Bentuk kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi berupa Tri Dharma di bidang pengajaran/pendidikan guna membentuk pola pikir masyarakat yang baik. Di bidang penelitian bertujuan untuk menggali dan menemukan fenomena permasalahan pembangunan di berbagai bidang berdasarkan pendekatan teoritis dan metodologi yang baik dalam upaya memberikan *input* kepada pemerintah daerah sehingga mampu mewujudkan kebijakan publik yang tepat bagi peningkatan kinerja UMKM dan juga pembangunan daerah yang berkualitas. Demikian juga di bidang pengabdian, peran kelompok perguruan tinggi dapat memberikan berbagai pelatihan dan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati, (2012) mengungkapkan bahwa peran Perguruan Tinggi sangat besar dalam pemberdayaan *entrepreneurship*.

Pengaruh Inovasi Teknologi Terhadap Kinerja UMKM

Selanjutnya untuk variable inovasi teknologi menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0.250428 dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari α (0.0051<0,05). Hal ini berarti bahwa secara parsial variable inovasi teknologi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten TTU. Jika inovasi teknologi ditingkatkan sebesar 0,250428 persen maka akan turut meningkatkan pertumbuhan kinerja UMKM sebesar satu persen. Variabel inovasi teknologi di dalam penelitian ini adalah mengenai kemampuan adaptasi pelaku

UMKM di wilayah perbatasan NKRI-Timor Leste dalam melakukan transformasi digital berupa penerapan *e-commerce* dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Dari hasil observasi lapangan dan juga penelusuran informasi diketahui bahwa sangat jarang pelaku UMKM di lokasi penelitian yang telah menerapkan bentuk digitalisasi ekonomi. Metode pemasaran berbagai produk UMKM masih menerapkan cara lama yang bersifat konvensional, dengan membawa seluruh produk yang ingin diperdagangkan menggunakan kendaraan yang dimiliki ataupun kendaraan umum menuju pasar perbatasan yang menjadi tempat mereka berdagang. Metode pemasaran seperti ini tentu sangat tidak efektif dalam upaya untuk meningkatkan skala usaha, segmentasi pasar juga pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Andini, Djaelani and Millaningtyas, (2016) menjelaskan bahwa penerapan teknologi dengan berbagai inovasi digital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja UMKM di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM dituntut agar sekiranya dapat adaptasi dengan lingkungan dan perkembangan arus modernisasi yang kian dinamis.

Ada beberapa persoalan mendasar yang dijumpai di lokasi penelitian, mengapa pelaku UMKM Pasar Perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste selama dalam masa pandemic tidak mampu menerapkan teknologi digital dalam menjalankan usaha mereka. Masalah terbesar disebabkan oleh karena minimnya pemahaman akan literasi digital sehingga pelaku UMKM boleh dikatakan “gagap” dalam menerapkan bisnis *online* melalui berbagai *platform* digital yang ditawarkan. Selain masalah minimnya pemahaman penerapan system *e-commerce* dalam bisnis *online*, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan infrastruktur jaringan dalam mendukung penerapan digitalisasi ekonomi. Pengertian infrastruktur jaringan ini seperti tenaga ahli bidang teknologi informasi, jejaring pemasaran secara *online* yang belum terbentuk secara baik, harga paket data yang tergolong mahal di kawasan Indonesia bagian timur, hingga belum begitu maksimalnya tangkapan *signal* akibat belum meratanya pembangunan stasiun pemancar telkomsel maupun indosat di wilayah perbatasan Kabupaten TTU dikarenakan topografi wilayah ini bergunung-gunung, rawan longsor sehingga akan menelan anggaran yang cukup besar dalam pembangunannya.

Terlepas dari segala kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi bukan berarti kondisi ini membuat Pelaku UMKM terus terlena dengan situasi yang dialami saat ini. Semangat untuk tumbuh dan berkembang seturut perkembangan digitalisasi ekonomi yang semakin tumbuh pesat tetap dimiliki oleh pelaku UMKM di Provinsi NTT secara umum dan khususnya di Kabupaten TTU yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratiyah, Hartanti and Setyaningsih, (2021) mengungkapkan bahwa 90 persen pelaku UMKM tenun ikat di Kota Kupang telah siap untuk menerapkan system *e-commerce* dalam menjalankan usaha mereka. Dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah dan seluruh *stake holders* terkait sangat dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan pelaku UMKM di wilayah perbatasan menghadapi tantangan perkembangan arus globalisasi yang kian modern dan kompetitif.

Pemerintah Daerah perlu melakukan kolaborasi dan bermitra dengan lembaga Perguruan Tinggi, Pihak Provider Telkomsel ataupun Indosat dan Lembaga Perbankan. Dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia maka untuk

kepentingan jangka panjang lembaga Perguruan Tinggi bisa berperan melalui pendidikan vokasi yang mengarah pada keahlian dan spesifikasi ketrampilan di bidang teknologi digital. Masyarakat dipersiapkan melalui jalur pendidikan formal dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern. Sedangkan untuk kepentingan jangka pendek, pelaku UMKM dilatih dengan berbagai metode pemasaran menggunakan *platform market place* yang disediakan. Dukungan Lembaga Perbankan juga dapat diwujudkan melalui system transaksi perdagangan dengan metode QRIS ataupun platform layanan pembayaran menggunakan fasilitas *Mobile Banking* yang aman dan terpercaya (Aryawati, Mahardika and Wibawa, 2022). Selanjutnya perusahaan telekomunikasi dengan otoritas yang dimilikinya bisa jadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah prioritas untuk perluasan jaringan telekomunikasi guna mendukung berbagai aktifitas ekonomi masyarakat. Wilayah perbatasan adalah Representasi wajah Indonesia, maka sudah selayaknya mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur yang memadai tidak terkecuali akses telekomunikasi (Irdyanti, 2017).

Pengaruh Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja UMKM

Selanjutnya untuk variable dukungan pemerintah diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,282313 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari *alpha* ($0,0090 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa kinerja UMKM akan mengalami peningkatan kinerja sebesar 1 persen jika variable dukungan pemerintah ditingkatkan perannya sebesar 0,0090 persen, dengan tetap memperhatikan prinsip *ceteris paribus*. Hasil ini mempertegas bahwa dukungan setiap level pemerintahan sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung sektor perdagangan khususnya bagi pelaku UMKM terutama bagi Industri kreatif di wilayah perbatasan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan dengan Negara Timor Leste di bulan April tahun 2022 mengalami surplus sebesar US\$ 13.239.306. Dimana Nilai ekspor tersebut datang dari sektor migas dengan nilai ekspor sebesar US\$ 176.723 sedangkan untuk sektor non migas sebesar US\$ 2.377.637. Walaupun mengalami surplus dalam neraca perdagangan akan tetapi jika dibandingkan dengan bulan maret tahun 2022 (satu bulan sebelumnya), sebenarnya kinerja ekspor Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 15,61 persen atau setara dengan US\$ 3.026.920 akibat melemahnya beberapa komoditi strategis perdagangan baik dari sektor migas maupun non migas. Makin melemahnya kinerja ekspor ke Negara Timor Leste tentu disebabkan pula oleh menurunnya kontribusi UMKM bagi perekonomian wilayah.

Mengingat besarnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum, dukungan pemerintah melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat krusial. Diperlukan integrasi kebijakan dari seluruh tingkatan pemerintahan—mulai dari tingkat desa hingga nasional—yang dapat bermitra dengan lembaga perbankan, institusi pendidikan, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil yang berpihak pada keberlanjutan UMKM, khususnya di tengah situasi pandemi yang masih berdampak. Hartanti, (2021) menyarankan bahwa dukungan pemerintah terhadap UMKM selama masa pandemi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama: *empowering*, *enabling*, dan *protecting*. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan UMKM dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dukungan jangka pendek dapat

diwujudkan melalui program bantuan sosial, kemudahan perizinan usaha, pelatihan, dan pendampingan. Sementara itu, program jangka menengah dan panjang dapat meliputi insentif pajak, pengembangan keterampilan produksi, sertifikasi produk, digitalisasi pemasaran melalui kemitraan strategis, hingga pemberian proteksi terhadap *infant industry* agar terlindungi dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan berskala besar.

Namun, realitas di lapangan, khususnya di pasar-pasar perbatasan Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, meskipun kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah diperkirakan mencapai 43 persen. Beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius antara lain adalah terbatasnya program bantuan sosial yang secara langsung menysasar pelaku UMKM terdampak pandemi, belum diberlakukannya insentif fiskal, minimnya kemitraan dengan pasar modern untuk mendukung distribusi produk UMKM, serta belum optimalnya peran perguruan tinggi dalam memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan teknis.

Selain itu, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari lembaga perbankan masih bersifat eksklusif; ekosistem UMKM berbasis digital belum terbentuk secara utuh; peran BUMDes sebagai mitra distribusi produk UMKM masih terbatas; dan pendampingan dalam aspek labelisasi, perizinan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) produk unggulan daerah masih lemah. Permasalahan ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur penunjang, seperti penataan pasar perbatasan yang belum representatif, keterbatasan jaringan internet dan telekomunikasi, serta rendahnya sinergi kelembagaan antar aktor pembangunan di tingkat lokal.

Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di wilayah perbatasan, semakin krusial. Di tengah keterbatasan akses, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya struktur kelembagaan, pelaku UMKM di kawasan perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara–Timor Leste menghadapi tekanan yang tidak ringan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terarah dari pemerintah daerah agar UMKM mampu bertahan dan bangkit secara berkelanjutan.

Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, strategi intervensi perlu dibagi ke dalam dua fokus utama: jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek dapat dimulai dengan penguatan jaring pengaman sosial melalui penyaluran bantuan langsung tunai, pemberian insentif pajak, serta perluasan akses permodalan baik dari anggaran pemerintah maupun kemitraan dengan lembaga keuangan melalui skema kredit lunak. Di samping itu, penting untuk membentuk badan usaha kolektif seperti koperasi atau asosiasi yang menaungi pelaku UMKM sebagai bentuk penguatan kelembagaan. Kehadiran organisasi ini tidak hanya berfungsi melindungi anggotanya, tetapi juga menjadi alat untuk memperluas jaringan pemasaran yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan (Hartanti, 2021).

Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan aktif dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam rangka memperluas serapan produk UMKM. Produk lokal dapat diprioritaskan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah sebagai bentuk promosi dan dukungan nyata. Upaya ini harus disertai dengan fasilitasi agar produk UMKM dapat memenuhi standar pasar modern, termasuk kelengkapan label,

kualitas, serta sertifikasi keamanan pangan dari lembaga seperti Balai POM. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga juga penting agar setiap instansi terkait berperan sesuai kewenangannya—baik dalam pelatihan, promosi, peningkatan kualitas produk, penyederhanaan perizinan, maupun perlindungan hukum. Sementara itu, dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus mendorong pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan industri, terutama dalam konteks revolusi industri 4.0. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan UMKM yang melibatkan berbagai pihak—pelaku usaha, lembaga perbankan, pelaku CSR, akademisi, dan tokoh masyarakat—guna menghasilkan dokumen kebijakan terpadu sebagai acuan dalam pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi program (Fatimah and Azlina, 2021).

Selain itu, penerapan digitalisasi ekonomi juga menjadi keniscayaan. Pelaku UMKM perlu didorong untuk mengadopsi teknologi digital sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha. Program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berbasis digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan oleh dinas teknis, lembaga keuangan, maupun institusi pendidikan tinggi. Transformasi menuju ekonomi digital atau *Go-Digital* harus menjadi agenda utama dalam menjawab tantangan modernisasi dan mendorong UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kinerja UMKM

Hasil analisis selanjutnya dari variable norma subjektif diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.586869 dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa secara parsial variable norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM di Pasar Perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste. Angka 0.586869 mengandung makna bahwa setiap kenaikan kinerja UMKM sebesar satu persen akan turut meningkatkan variable norma subjektif sebesar 0.586869 persent ketika variable lainnya dianggap konstan.

Pengertian norma subjektif dalam penelitian ini adalah mengenai cara pandang orang lain baik yang bersifat positif maupun negative terhadap apa yang diyakini dan dapat memengaruhi keputusan akhir seseorang (Shalwoharjimas, 2019). Kinerja UMKM untuk tumbuh dan berkembang juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan pelaku UMKM menjalankan usahanya yang juga dipengaruhi oleh pendapat orang lain atau lingkungan dimana tempat mereka menjalankan usaha. Dengan kata lain berhasil tidaknya usaha yang digeluti oleh seseorang sangat tergantung dari *input* yang diberikan oleh orang lain. Bila cara pandang orang lain kepada pelaku UMKM bersifat positif berupa edukasi, dorongan motivasi dan semangat maka bisa dipastikan akan turut meningkatkan kemajuan usaha, akan tetapi bila sebaliknya cara pandang yang diberikan lebih banyak memuat hal-hal negatif, pesimis bahkan cibiran tentunya bisa berdampak buruk bagi kemajuan usaha. Oleh karena itu pelaku UMKM perlu berada dalam lingkungan yang bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat.

Harus diakui bahwa umumnya masyarakat yang berada di Kabupaten TTU secara kultural memiliki modal sosial yang sangat kuat. Modal sosial yang dimiliki

dipandang sebagai budaya gotong royong, kebersamaan bahkan rasa persaudaraan yang tetap terjaga hingga saat ini. Ada nilai yang ditanamkan pada masyarakat Dawan di pulau Timor dengan sebuah filosofi “Tabua Nekaf Mese Ansaof Mese”, yang mengandung makna “Bekerjasama Sehati Sepikiran”. Pandangan ini tentu telah menjadi budaya yang sangat mengakar dalam keseharian bahkan merupakan symbol persaudaraan yang sangat kuat. Kepemilikan modal sosial ini sudah seharusnya menjadi pilar utama yang bisa digunakan dalam semangat kekeluargaan, bahu membahu dalam menunjang segala usaha yang dijalankan bahkan dalam memerangi kemiskinan di Pulau Timor (Be, 2021). Berangkat dari kondisi budaya masyarakat dawan di Pulau Timor sebagaimana yang diuraikan di atas, secara tidak langsung turut memengaruhi pola pikir dan sikap dalam mengambil keputusan berusaha sekalipun dalam situasi sulit di masa pandemic. Rasa percaya diri, motivasi dan dorongan dari orang-orang terdekat adalah modal terbesar untuk tumbuh dan terus berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Fanani and Fitrayati, (2021) mengungkapkan bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM makanan dan minuman di Surabaya. Demikian pula yang diungkapkan oleh Putro *et al.*, (2022) bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat perannya sangat besar dalam menunjang kinerja pengrajin UMKM di kampung Pulun.

Berhasil tidaknya usaha bisnis UMKM yang dijalankan sangat tergantung dari bentuk kepercayaan diri yang dimiliki yang bisa berasal dari persepsi atau cara pandang orang terdekat di sekitar lingkungan kita (Supriono, 2015). Kepercayaan ini bisa timbul jika setiap pelaku UMKM memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai dalam *memanage* usaha mereka. Oleh karena itu kematangan diri adalah benteng terbaik dalam melakukan filter akan semua informasi yang masuk dalam upaya memengaruhi usaha yang dijalankan. Segala bentuk masukan yang bersifat positif dijadikan sebagai motivasi dan suplemen terbaik dalam mengembangkan usaha, sedangkan jika yang datang adalah berbagai nada pesimistis maka tetap diterima sebagai rintangan atau tantangan kecil yang tetap harus dilalui. Modal terbesar dalam menjalankan bisnis adalah keberanian. Berani akan menerima segala resiko yang dihadapi (NUR'ARIF, 2021). Pengalaman membuktikan bahwa banyak orang sukses di dunia ini yang meraih kesuksesan besar dikarenakan kepemilikan mental dan keberanian yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Hal inilah yang perlu dimiliki oleh seluruh pelaku UMKM di wilayah perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait, misalnya Deprindagkop untuk selain program utama yang dijalankan berupa peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, akan tetapi yang tidak boleh dilupakan juga adalah mengenai dorongan semangat dan bentuk motivasi yang diberikan untuk menumbuhkan sikap percaya diri yang tinggi dalam menjalankan usaha.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian di atas maka ada beberapa hal penting yang dapat dilihat antara lain adalah: (i) Dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa secara parsial literasi keuangan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan untuk variabel inovasi

teknologi, dukungan pemerintah dan norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM di Pasar Perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste. (ii). Dari hasil pengujian simultan diketahui bahwa secara serentak variabel literasi keuangan, inovasi teknologi, dukungan pemerintah dan norma subjektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM Pasar Perbatasan Kabupaten TTU-Timor Leste. (iii). Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja UMKM maka langkah strategis yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yang antara lain adalah peningkatan literasi keuangan melalui program pelatihan dan pendampingan, penguatan akses teknologi dengan menerapkan sistem ekonomi digital, dukungan pemerintah berupa peningkatan kualitas SDM, penguatan kualitas produksi, membangun pola kemitraan dengan berbagai pihak, penciptaan layanan birokrasi yang ramah investasi, labelisasi produk, penciptaan asosiasi organisasi kelompok UMKM kawasan perbatasan, hingga dorongan motivasi dan percaya diri dalam menjalankan usaha.

Pengakuan

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor atas dukungan pendanaan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara atas fasilitasi dan kerja samanya selama proses penelitian berlangsung. Secara khusus, penulis menghaturkan penghargaan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan perbatasan yang telah berpartisipasi sebagai responden dan memberikan informasi berharga. Kontribusi seluruh pihak tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran serta kedalaman substansi penelitian ini.

References

Laporan

Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Tahun 2022

Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU, Tahun 2021

Artikel dari Jurnal

Amalia, R. F. and Nurussama, N. (2018) 'Analisis Hubungan Norma Subjektif Terhadap Minat Pengusaha UMKM Untuk Membuat Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Dengan Kemampuan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2(1), pp. 9–19. doi: 10.36778/jesya.v2i1.27.

Amri, A. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia', *Jurnal Brand*, 2(1), pp. 123–130. Available at: https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia.

- Andini, M., Djaelani, A. K. and Millaningtyas, R. (2016) 'Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kreativitas, Dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM Himpunan Pengusaha Kecil Dan Mikro Indonesia Di Banjarmasin (Studi Kasus Pada Sektor Kuliner Di Masa COVID-19)', *e - Jurnal Riset Manajemen*, 1, pp. 82–94.
- Aribawa, D. (2016) 'Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM Di Jawa Tengah', *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(4), pp. 425–430. doi: 10.1007/s10006-013-0431-4.
- Aryawati, N. P. A., Mahardika, I. M. N. O. and Wibawa, I. G. J. S. (2022) 'Persepsi Pengguna QRIS Pada UMKM Di Kota Mataram', *Guna Sewaka*, 1(2), pp. 35–44. doi: 10.53977/jgs.v1i2.668.
- Basry, A. and Sari, E. M. (2018) 'Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)', *IKRA-ITH INFORMATIKA : Jurnal Komputer dan Informatika*, 2(3), pp. 53–60. Available at: <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/266>.
- Be, E. (2021) 'Budaya Kerjasama “Nekaf Mese Ansaof Mese” Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara.', *EKOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), pp. 2503–3093.
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L. and Fatharani, H. (2021) 'Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19', *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), pp. 138–149. Available at: <http://fe.umm metro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/613>.
- Desiyanti, R. (2014) 'Pengaruh Pemasaran Produk, Keuangan Usaha dan Dukungan Pemerintah Terhadap Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil Rotan Di Kota Padang', *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 2(3), pp. 193–202. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Elim, Y. V., Sangaji, A. H. and Nggili, N. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Provinsi NTT', *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business 2021*, 2(1), pp. 799–817.
- Eryc (2022) 'Pengaruh Dampak Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), pp. 1693–1704. Available at: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5594>.
- Faizi, F. et al. (2022) 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 11(2), p. 137. doi: 10.34127/jrlab.v11i2.510.
- Fanani, Y. K. and Fitrayati, D. (2021) 'Pengaruh Modal Insani dan Modal Sosial Terhadap Kinerja UMKM Makanan dan Minuman di Surabaya', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), pp. 84–89. doi: 10.26740/jupe.v9n3.p84-89.
- Fatimah, S. and Azlina, N. (2021) 'Pengaruh Teknologi Informasi dan Inovasi Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Dumai', *Jurnal Riset AKuntansi dan Perbankan*, 15(1), pp. 444–459. Available at: <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Hartanti, W. (2021) 'Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm', *Indonesian Journal of Strategic Management*, 4(1). doi: 10.25134/ijsm.v4i1.3952.
- Ilarrahmah, M. D. and Susanti (2021) 'Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, Literasi Keuangan Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 5(1), pp.

- 51–64. doi: 10.29408/jpek.v5i1.3327.
- Irdyanti, I. (2017) 'Membangun Ketahanan Informasi Di Daerah-Daerah Perbatasan Indonesia', *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(2), p. 135. doi: 10.24014/trs.v9i2.4328.
- Maryati, W. (2012) 'Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Entrepreneurship untuk Mengembangkan Wirausahawan Kecil Menghadapi Persaingan Global', *Prosiding Seminas Competitive Advantage*, 1(2). Available at: <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/144>.
- Nalle, F. W., Pangastuti, M. D., et al. (2022) 'Analisis Determinan Faktor Penentu Usia Harapan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur', *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(3), pp. 459–472. doi: 10.29264/jinv.v18i3.10813.
- Nalle, F. W., Seran, S., et al. (2022) 'Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(28), pp. 206–220. doi: 10.33059/jseb.v13i2.4962.
- Nalle, F. W. and Afoan, F. (2022) 'Analisis keuangan inklusif dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara', *Fair Value*, 4(4), pp. 1900–1911. doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%204.1051>.
- Nalle, F. W. and Pangastuti, M. D. (2022) 'Poverty level analysis in East Nusa Tenggara Province Frederic', *INOVASI*, 18(4), pp. 820–830.
- NUR'ARIF, M. I. (2021) 'Karakteristik Kewirausahaan Terhadap Faktor Penentu Keberhasilan Umkm', *Sintesa Stie Sebelas April* Available at: <http://ejournal.stie11april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/download/146/129>.
- Nurlaela, R. and Bahtiar, D. (2022) 'Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Perencanaan Keuangan Terhadap Perilaku Menabung', 5(3), pp. 595–611.
- Oki, K. K. (2021) *Perdagangan Lintas Batas, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi-Timor Leste*, CV. Qiara Media. CV. Qiara Media.
- Oki, K. K. and Babulu, N. L. (2021) 'Transaction Cost of Black Market in the Region Timor-Leste Border', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(2), pp. 169–178. Available at: <http://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/article/view/26990>.
- Oki, K. K. and Burhanuddin (2020) 'Impact of cross-border trade on community institution changes in the border area of Oekusi district', *Test Engineering and Management*, 83(500), pp. 500–508.
- Patiung, M. and Taus, W. (2022) 'Dampak Perdagangan Lintas-Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1), pp. 94–102. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i1.3448>.
- Pratiwi, M. I. (2020) 'Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm', *Jurnal Ners*, 4(2), pp. 30–39. doi: 10.31004/jn.v4i2.1023.
- Pusporini, P. (2020) 'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku Umkm Kecamatan Cinere, Depok', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(1), pp. 58–69. doi: 10.31933/jimt.v2i1.315.
- Putro, H. P. N. et al. (2022) 'Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Umkm Kerajinan Di Kampung', *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(April), pp. 203–209.

- Rahayu, A. Y. (2017) 'Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Kota Surabaya', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2016).
- Ratiah, R., Hartanti, H. and Setyaningsih, E. D. (2021) 'Inovasi dan Daya Kompetitif Para Wirausahawan UMKM: Dampak dari Globalisasi Teknologi Informasi', *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5(2), pp. 152–163. doi: 10.31294/eco.v5i2.10582.
- Redjo, P. R. D. (2022) 'Analisis Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara', *Jurnal MONEX*, 01(11).
- Rosita, R. (2020) 'Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia', *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), p. 109. doi: 10.34127/jrlab.v9i2.380.
- Rusman (2021) 'Dampak Covid 19 Terhadap Angka Pengangguran di Indonesia', *Proceeding Seminar Nasional Journal*, pp. 687–693.
- Sabilla, S. O. and Wijayangka, C. (2019) 'Pengaruh literasi keuangan terhadap pertumbuhan usaha pada UMKM', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), pp. 145–152.
- Septiani, R. N. and Wuryani, E. (2020) 'Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Sidoarjo', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), p. 3214. doi: 10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16.
- Seran, R. (2019) 'Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste', *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), pp. 170–188. doi: 10.20473/jhi.v11i2.9226.
- Shalwoharjimas, F. (2019) 'Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsian, Dan Motivasi Terhadap Minat Kepatuhan Pajak Pengusaha Umkm Di Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1), pp. 1–13.
- SUCI, M. (2020) 'Peran Norma Subyektif Dan Motivasi Pengusaha Pada Keputusan Pembiayaan Utang Ukm', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 6(1), p. 68. doi: 10.23887/bjm.v6i1.24402.
- Suci, N. M. (2016) 'Pertumbuhan Usaha Yang Dimediasi Oleh Sikap Pada Pertumbuhan Usaha, Norma Subjektif dan Perceived Behavior Control Pengusaha UKM', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1).
- Sulastri, R. E. and Dilastrri, N. (2015) 'Peran Pemerintah Dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman', *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2(1), pp. 87–94.
- Supriono (2015) 'Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Persepsi Penggunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Minat Penggunaan Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 3, pp. 54–68. Available at: <http://e-journal.polsa.ac.id/index.php/jneti/article/view/58>.
- Taena, W., Rustiadi, E. and Hariyoga, H. (2010) 'Pengembangan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (W. Taena et al.)', *Forum Pascasarjana*, 33(1), pp. 35–53.
- Wangke, H. (2013) 'Perdagangan Lintas Batas Antar-negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu', *Jurnal Politica*, 4(1), pp. 1–24.

- Wiranta, S. (2008) 'Kinerja Perdagangan Lintas Batas NTT-Timor Leste', in *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, pp. 187–215.
- Yanti, W. I. P. (2019) 'Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1). Available at: <http://sahabatpegadaian.com/keuangan/inklusi-keuangan>.
- Zakarias Dos Santos Maia, Marianus Kleden, D. D. D. (2020) 'Ekonomi Politik Kebijakan Pas Lintas Baatas Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste', *International Encyclopedia of Housing and Home*, 2(2), pp. 87–98.

Web Page

- Ahdiat, Adi, 2020. Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya? (Online). Dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>. (Diakses: 30 Desember 2022).
- Atmaja, Nyoman Ariawan, 2020. Ribuan UMKM di NTT Terkena Dampak Covid-19 (Online). Dari: <https://kupang.antaranews.com/berita/32451/ribuan-umkm-di-ntt-terkena-dampak-covid-19>. (Diakses: 29 Desember 2022).